

BAB III

PERKEMBANGAN MILITER DI NEGARA-NEGARA KAWASAN

Di era kini negara dan masyarakat internasional semakin mudah dan luas untuk mengakses informasi baik bersifat nasional maupun internasional. Terutama informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan militer dewasa ini sudah menjadi menu utama sehari-hari yang mewarnai berbagai media kabar. Oleh karena itu saat ini militer bukanlah hal yang hanya melekat dan identic dengan negara.

Berbanding terbalik dengan cita-cita negara maupun masyarakat internasional akan kehidupan dunia yang damai, semakin hari kita bisa mendapati kabar terkait militer baik dari yang bersifat perdamaian sampai kabar keagresifan militer suatu negara terhadap negara lain, kabar mengenai negara-negara yang dengan bangga memperlihatkan kepada dunia perihal kapabilitas pertahanan maupun militernya, serta kabar konflik antar negara yang sampai memakan korban.

Trauma akan dampak dari kejayaan militer negara-negara terdahulu tampaknya telah memudar, dimana peran militer membawa mereka pada masa imperialisme dan titik puncaknya adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang membawa dampak fisik maupun psikologis hampir di seluruh belahan dunia.

Tidak sedikit negara yang sedang berbenah untuk mencapai titik kemampuan militer yang mumpuni dan dapat diperhitungkan oleh negara lain, negara-negara tersebut tidak hanya pemeran utama pada zaman imperialisme

maupun perang dunia yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jepang dan Tiongkok, tetapi merambah pada negara-negara berkembang yang notabene kehidupan bernegaranya masih terfokuskan pada kelangsungan perekonomian, seperti negara-negara ASEAN, Korea Utara, Afrika, dan India.

Anggaran belanja pertahanan dan militer negara lambat namun pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama di beberapa negara seperti Tiongkok dan Jepang. Bahkan ketika terjadi pemerosotan global anggaran belanja militer karena terjadi ketidakstabilan ekonomi di beberapa negara, Barat merasa merugi dan menghimbau untuk terus menanam kembali kapabilitas keamanan setelah negara tersebut pulih kondisinya.

Tren negara-negara berlomba untuk mendapatkan kejayaan pertahanan dan militernya kembali juga sebanding dengan meruncingnya kompleksitas ancaman militer di berbagai hal seperti konflik antar negara, ancaman terorisme, ancaman dari perkembangan senjata modern, serta ancaman dari sisi ekonomi. Hal-hal tersebut menarik militer kembali pada suatu titik prioritas yang harus diperhatikan dewasa ini.

A. Hubungan Militer Jepang - Amerika Serikat

Hubungan yang dijalin oleh Jepang dan Amerika Serikat sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-19 dengan misi diplomatik oleh kapten kapal Amerika Serikat James Glynn dan Matthew C. Perry kepada Keshogunan Tokugawa. Kedua negara menjalin hubungan yang cukup baik setelah itu, dan cukup banyak orang Jepang yang bermigrasi ke Amerika Serikat hingga sebelum Perang Dunia II terjadi. Tragedi bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan

Nagasaki menjadi pemicu berakhirnya perang dan menyebabkan pendudukan militer Jepang oleh Amerika Serikat. Namun dikarenakan Amerika Serikat sedang dalam masa pembangunan kembali dan ingin berbagi teknologi dengan Jepang, hubungan keduanya dapat makmur kembali. Pertukaran teknologi yang ditambah dengan pertukaran budaya antar kedua negara tersebut menghasilkan sebuah aliansi yang kuat. Sejak saat itu hubungan Jepang-Amerika Serikat berlangsung baik, khususnya pada bidang perdagangan, dengan meningkatnya konsumen barang-barang elektronik dan mobil produksi Jepang di Amerika Serikat⁹⁶.

Terbentuknya aliansi AS Jepang bermula ketika Jepang menderita kekalahan pada Perang Dunia II yang berakibat pendudukan wilayah Jepang oleh pasukan AS. Setelah berakhirnya masa pendudukan tersebut, AS berkeinginan merangkul Jepang untuk di jadikan sebagai sekutu utama dan pilar pertahanan di Asia. Berdasarkan perjanjian keamanan yang dibuat, maka AS memiliki komitmen untuk menjamin keamanan Jepang dan melindunginya dari bahaya lingkungan eksternal dalam hal ini ancaman dari agresi militer US beserta sekutunya-sekutunya yang berada di Asia seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Jepang menandatangani perjanjian damai (peace treaty) pada September 1951 dengan Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pada saat yang bersamaan Jepang juga menandatangani perjanjian militer dengan AS (JapanU.S. Security Treaty) yang mengizinkan AS untuk menempatkan kekuatan militernya di Jepang. Perjanjian mulai efektif berlaku pada 28 Februari 1952 bersamaan dengan berakhirnya masa kependudukan sekutu (AS) di Jepang serta

⁹⁶ Japan–United States relations, https://en.wikipedia.org/wiki/Japan–United_States_relations.
Diakses 1 Desember 2018

kemerdekaan Jepang yang diakhiri dengan perjanjian keamanan dan perdamaian dengan AS⁹⁷

Jepang yang berada berada di dalam blok AS menyadari bahwa ancaman blok komunis Sino-Soviet sudah semakin dekat dengan wilayahnya. Ancaman itu dianggap dapat membahayakan padahal itu hanya merupakan taktik dari US untuk membuka akses ke laut Jepang serta menguasai Semenanjung Korea yang mengelilingi wilayah Jepang. Keadaan ini tentu saja merupakan ancaman bagi Jepang yang hanya memiliki kemampuan pertahanan terbatas (*exclusively defensive*).⁹⁸

Pada tahun 1960 melalui *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States of America and Japan*. Perjanjian kerjasama militer ini menggantikan perjanjian keamanan *Japan-US Security Treaty* tahun 1951. Dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* yang baru ini terdapat empat hal pokok yang menjadi dasar pemikiran perjanjian keamanan yang baru tersebut, yaitu:⁹⁹

1. AS dan Jepang menyadari keberadaan ancaman militer bersama.
2. AS dan Jepang mempertimbangkan untuk kerjasama dalam keamanan.
3. AS dan Jepang memandang bahwa kebebasan politik & ekonomi harus dilindungi.

⁹⁷ Michael Leifer, 1986, *The Balance of Power in East Asia*, London: RUSI, hal.74

⁹⁸ Reinhard Drifte, 1992, *Japan's Defense Policy and the Security of the Korean Peninsula in the 1990's*, Winter Spring,, hal 67-70.

⁹⁹ Masashi Nishihara, 1991, *New Roles for the U.S.-Japan Security Treaty*, Spring/Summer, Tokyo, hal. 24.

4. Untuk mendukung pandangan ini AS dan Jepang setuju agar AS menanggung kewajiban untuk melindungi keamanan Jepang dan kawasan timur jauh.

Pada awalnya Jepang berkonsentrasi pada bidang ekonomi untuk membangun kembali negaranya yang hancur akibat perang sehingga menyerahkan pertahanan dan keamanannya kepada AS. Namun dengan adanya perang Korea pada awal 1950-an telah mengubah kebijakan pendudukan AS mengenai larangan pembentukan angkatan bersenjata dan potensi perang lainnya.

Hubungan antara Jepang dan AS inipun tertuang dalam Dalam Guidelines kerjasama pertahanan Jepang dan AS mencakup tiga wilayah, yaitu:¹⁰⁰

1. Digunakan untuk mencegah agresi (melalui kerjasama dalam keadaan normal).
2. Aksi yang dilakukan sebagai respon terhadap serangan atas Jepang.
3. Kerjasama Jepang-AS di luar wilayah Jepang yaitu di daerah timur jauh yang berpengaruh terhadap keamanan Jepang.

Tujuan utama dari Guideline adalah sebagai formulasi kebijakan yang digunakan dalam aksi bersama Jepang-AS untuk mengatasi serangan terhadap Jepang dan juga menekankan kerjasama dalam situasi di timur jauh (Far East) di luar Jepang yang memiliki pengaruh penting terhadap keamanan Jepang.

¹⁰⁰ Japan-US defense cooperation guidelines must mark new era - See more at: <http://news.asiaone.com/news/asian-opinions/japan-us-defense-cooperation-guidelines-must-mark-new-era#sthash.cDdihZ5G.dpuf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018

Sampai pada berakhirnya Perang Dingin telah membuka kembali perdebatan masalah aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat. Beberapa negara Asia, kaum liberal Amerika dan kaum pasifis Jepang mengkritik aliansi tersebut yang dinilai tidak kondusif lagi pada era Pasca Perang Dingin ini. Perang Teluk II (1990) telah memberi pelajaran terhadap posisi Jepang dalam masalah keamanan internasional, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.

Masyarakat Jepang menyatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat bagi Jepang untuk membubarkan diri dari aliansi dan menjadi negara “normal”. Namun demikian pemerintah Jepang tetap berkeyakinan untuk melanjutkan aliansi, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah Jepang memilih alternatif ini? Penelitian menyimpulkan bahwa lingkungan keamanan Jepang tidaklah benar-benar aman dan ada beberapa ancaman yang dianggap dapat mengganggu keamanan kawasan Pasifik, yaitu (1) peningkatan kapabilitas militer Cina, (2), masalah di Semenanjung Korea dan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara, (3) klaim beberapa negara atas Kepulauan Sparty, dan (4), klaim kepulauan Utara Jepang oleh Rusia. Untuk memelihara keamanannya, Jepang mempunyai pilihan yaitu tetap bergantung pada jaminan keamanan Amerika Serikat dibawah aliansi ataukah membubarkan diri.

Jika Jepang memutuskan untuk menarik diri dari aliansi maka Jepang harus meningkatkan kapabilitas militernya, karena Amerika Serikat tidak mempunyai komitmen lagi untuk melindungi Jepang dari kemungkinan agresi.

Remilitarisasi akan memungkinkan Jepang baik untuk mempertahankan diri maupun untuk mengembangkan politik luar negeri yang independen. Namun kecurigaan negara-negara Asia akibat trauma terhadap politik Asia Timur Raya dan sensitifitas kaum Pasifis Jepang juga menjadi hambatan bagi Jepang untuk memperkuat postur militernya. Jika Jepang memilih tetap melanjutkan aliansi, maka Jepang sering harus tunduk terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Jepang menyadari bahwa pada saat ini Jepang tidak mempunyai alternatif lain selain tetap melanjutkan aliansi karena diyakini masih efektif sebagai “factor deterrent” bagi perdamaian kawasan Pasifik.¹⁰¹

B. Perkembangan Isu Militer

Sejak berakhirnya perang dingin tahun 1990-an, perang ini mengubah tatanan internasional terutama terkait dengan isu-isu yang bersifat *high politics*. Isu-isu *high politics* seakan tidak lagi menjadi fokus utama negara-negara di dunia terutama menyangkut tentang isu kekuatan militer dan ketegangan suatu negara. Negara-negara lebih menginginkan kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. Maka negara-negara mulai membangun sebuah isu yang bersifat *low politics* dimana aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya cenderung menjadi fokus utama negara-negara dalam membangun sebuah hubungan antar negara.

¹⁰¹ Erna Kurniawati, Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat Era Pasca Perang Dingin, pada http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=5076&obyek_id=4. Diakses pada 10 Desember 2018

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi yang begitu pesat, mendorong terjadinya transformasi nilai yang dilakukan oleh para aktor-aktor politik yang kemudian memunculkan kembali lahirnya isu-isu *high politics* bersamaan dengan isu *low politics*. Perkembangan teknologi mendorong munculnya transformasi baru dalam bidang *high politics* terutama dalam hal kekuatan militer dengan konsep-konsep operasional baru. Perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan instrumen perang baru, tetapi juga menuntut akademisi dan praktisi militer untuk memikirkan keunggulan dan ancaman baru yang dimunculkan oleh inovasi tersebut.

Keunggulan teknologi militer sering menjadi faktor penentuan nasib sebuah negara ketika berhadapan dengan kekuatan militer negara lain. Sehingga, sebuah keharusan bagi setiap negara untuk terus meningkatkan keunggulan teknologi militernya, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dari perkembangan teknologi militer negara lain yang dapat mengancam kepentingan keamanan nasional suatu negara. Di era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia mulai disibukkan dengan adanya kompetisi oleh para aktor negara dalam memaksimalkan kekuatan militer dalam bentuk peningkatan anggaran militer masing-masing negara. Hal ini kemudian memunculkan yang disebut sebagai *security dilemma*.¹⁰²

Security dilemma menciptakan adanya strategi militer untuk negara-negara di dunia. Strategi militer merupakan salah satu sarana dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri. Berdasarkan pengertian dari Cathal J. Nolan dalam

¹⁰² Rizki Roza, "Dual-Use Teknologi Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional AS", *Jurnal Hubungan Internasional UMY*, Volume IV No. 1. Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008, Hlm. 15

The Greenwood Encyclopedia of International Relations, menjelaskan strategi adalah:

*a grand plan designed to obtain an ultimate military or political goal, by whatever means-political, economic, military, or diplomatic; ... Strategy in this, its fullest sense refers to the art and science of using the policy goals, or win its wars, by the best possible means (those least wasteful of lives, treasure, or other national interests). Strategy thus involves a great deal of planning over a long period and employs the full resources of the military, intelligence, and diplomacy. A narrower sense of the terms is the employment of armed force to reach specific military objectives in a war..*¹⁰³

Strategi militer yang direncanakan merefleksikan bagaimana kapabilitas pertahanan suatu negara. Kapabilitas pertahanan suatu negara dikaitkan dengan kemampuan negara tersebut. Alfin Toffler mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan negara di era reformasi berasal dari tiga hal, yaitu: kemampuan mempengaruhi serta menekan negara lain (*power/politics*) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan bersenjata (militer); ekonomi (*wealth*); dan ilmu pengetahuan serta teknologi (*knowledge*).¹⁰⁴

Dalam kondisi politik global yang semakin kompetitif dan penuh dengan konflik, kapabilitas nasional suatu negara menjadi elemen yang penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Negara dengan tingkat pembangunan ekonomi dan teknologi yang kuat biasanya pada saat yang sama juga memiliki

¹⁰³ Cathal J. Nolan, "The Greenwood Encyclopedia of International Relations". Vol. 4, Westport, Greenwood Press, 2002, Hal.160.

¹⁰⁴ Wibawanto Nugroho, "Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara", *Verity*. Vol.1. No.1. Hal.70

kapabilitas militer yang kuat. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara peralatan militer yang canggih dengan biaya yang mahal yang tidak bisa ditanggung oleh negara-negara berkembang.

Realitas politik global yang sangat kompleks dewasa ini menuntut agar kapabilitas nasional harus memperhitungkan perkembangan teknologi komunikasi dan militer yang semakin canggih sehingga faktor geografis dan kekayaan sumberdaya alam tidaklah lagi secara mutlak menentukan superioritas suatu negara terhadap negara-negara lain. Dalam masyarakat pasca-industri sekarang ini ada kebutuhan untuk meninjau kembali cara kita mengukur *national power* suatu negara.

Peningkatan kebutuhan militer negara-negara saat ini salah satunya sebagai tindakan pencegahan ancaman militer. Ancaman militer telah menjadi momok yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur, tetapi juga unsur-unsur ekosistem serta unsur kehidupan sosial politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman militer sampai saat ini masih merupakan prioritas setiap negara, mengingat tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah di raih rakyatnya dalam bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktivitas yang telah ditekuni, musnah karena peperangan.

Tingkat ancaman militer terhadap suatu negara bervariasi, tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Mulai dari pelanggaran batas territorial, hukuman, perebutan batas territorial negara, invasi, sampai ancaman pembumi-hangusan sebuah negara dengan adanya *blockade* pengeboman.

Tujuannya juga beragam, mulai dari persoalan minor seperti pelanggaran batas laut teritorial, sampai perbedaan paham yang dianut negara lain.¹⁰⁵

C. Peningkatan Kapabilitas Pertahanan dan Militer Negara Kawasan Asia Timur

Di tengah ketegangan yang masih terlihat di sejumlah titik di Asia, *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) dalam siaran persnya, 17 Maret 2014, melansir data soal kenaikan impor senjata dunia pada kurun waktu 2009-2013. SIPRI adalah lembaga pemikir berbasis di Stockholm, Swedia, yang mengawasi perdagangan senjata dunia. Menurut data SIPRI, jumlah impor senjata konvensional utama dunia mengalami kenaikan sebesar 14% pada tahun 2009-2013 dibandingkan kurun waktu sebelumnya, tahun 2004-2008. Dari 10 besar negara importir senjata dunia, 5 berasal dari benua Asia, yaitu India, Tiongkok, Pakistan, Korea Selatan, dan Singapura.

Di Asia, India memimpin dalam impor senjata, di mana dalam kurun lima tahun mencapai 14% dari total impor senjata dunia. Jumlah ini mengalami kenaikan dua kali lipat dari presentase impornya pada tahun 2004-2008 yang hanya sebesar 7%. Dengan presentase ini, impornya sekitar tiga kali lipat dari negara tetangganya, Tiongkok dan Pakistan. Pemasok utama senjata ke India pada 2009-2013 adalah Rusia, sekitar 75%, lalu diikuti Amerika Serikat 7% dan Israel

¹⁰⁵ T. May Rudy, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung, Refika Aditama, 2002, Hlm. 33

6%. Sedangkan impor senjata berasal dari Tiongkok 54% dan Amerika Serikat 27%.

Negara-negara Asia lain yang menunjukkan presentase impor besar adalah Korea Selatan dan Singapura. Korea Selatan, meskipun presentasinya besar, namun sebenarnya impor senjata mereka relatif menurun dalam dua kurun waktu (2004-2008 dan 2009-2013), sedangkan Singapura mengalami sedikit peningkatan yang awalnya 2% menjadi hampir 3%. Untuk Korea Selatan, meskipun mengalami penurunan impor senjata namun anggaran pertahanannya mulai 2014, dan untuk lima tahun ke depan, meningkat menjadi 214 triliun Won.

Data terbaru SIPRI dan perkembangan kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini seolah-olah memberi sinyal adanya peningkatan kekuatan pertahanan dan militer, atau bahkan telah terjadi “perlombaan senjata” di antara negara-negara kawasan. Peningkatan kekuatan militer dan pertahanan negara-negara di kawasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada faktor yang menggerakkan ke arah itu.

Pergeseran aktivitas militer AS ke Asia, tampaknya juga telah mempengaruhi negara-negara di kawasan untuk menyesuaikan diri atas kemampuan pertahanan dan militernya, setidaknya hal tersebut dilakukan untuk bisa sedikit mengimbangi kehadiran militer AS yang kini diproyeksikan ke wilayah Asia. Negara-negara di kawasan tentunya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam melihat kehadiran militer AS di Asia. Mereka juga perlu menampilkan diri dalam menghadapi kekuatan militer AS sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Untuk itu, peningkatan kekuatan pertahanan dan militer menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh negara-negara Asia

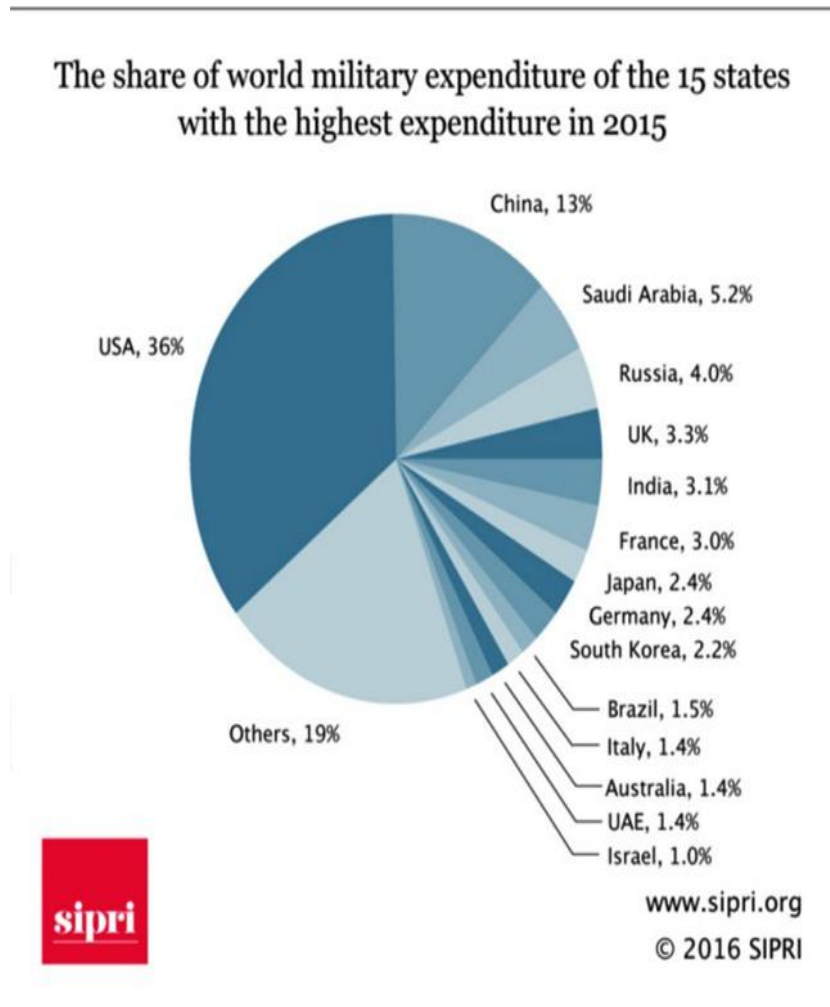
sekaligus untuk membangun kemandirian dalam hal pengamanan wilayah kedaulatan negara.

Kenaikan anggaran belanja negara-negara di Asia untuk pembelian peralatan pertahanan nasional menjadikan kawasan ini sebagai pasar potensial. Analisis Pertahanan dan Intelejen Internasional IHS Jane dalam penelitian terbarunya menyebutkan, anggaran pertahanan global akan terus meningkat hingga 2020. Asia-Pasifik akan menjadi kawasan yang paling ekspansif, dengan anggaran belanjanya yang meningkat 23% menjadi US\$533 miliar pada periode tersebut.

Jumlah itu akan menyamai anggaran belanja dari negara kawasan Amerika Utara, yang saat ini telah mencapai sepertiga belanja peralatan pertahanan dunia. Oleh karena itu berbagai perusahaan peralatan tempur menyoar kawasan Asia karena potensinya tersebut.

Gambar 3.1

Diagram Negara Pembelanja Militer Terbesar 2015



Sumber: www.sipri.org

Tabel 3.1
Rangking 25 Besar Kekuatan Militer Dunia
Versi Global Fire Power 4/1/2016 dari Total 126 Negara

Rangking	State	Power Index Score
1	United Satate of America	0.0897
2	Russia	0.0964
3	China	0.0988
4	India	0.1993
5	France	0.2164
6	United Kingdom	0.2466
7	Japan	0.2466
8	Turkey	0.2623
9	Germany	0.2646
10	Italy	0.2724
11	South Korea	0.2824
12	Egypt	0.3056
13	Pakistan	0.3246
14	Indonesia	0.3354
15	Brazil	0.3359
16	Israel	0.3591
17	Vietnam	0.3684
18	Poland	0.3909
19	Taiwan	0.3958
20	Thailand	0.4068
21	Iran	0.471
22	Canada	0.4192
23	Australia	0.4209
24	Saudi Arabia	0.4335
25	North Korea	0.4442

Sumber: <http://www.globalfirepower.com/countries-listing.as>

D. Respon Negara Kawasan Asia Timur Terhadap Konflik di Kawasan

Mulai bergesernya strategi politik dan pertahanan nasional di negara-negara di Asia-Pasifik. Salah satunya dipengaruhi oleh Tiongkok yang terus meningkatkan aktivitas militernya di kawasan sengketa Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

Hampir setiap tahunnya, Tiongkok meningkatkan persentase anggaran persenjataan dalam dua digit, artinya, peningkatan tersebut selalu di atas 10%. Dengan fakta meningkatnya angka tersebut, menimbulkan berbagai persepsi negatif khususnya dari negara-negara kawasan Asia Pasifik seperti Jepang. Bagi negara-negara Asia Pasifik lainnya, menilai bahwa ada kecenderungan Tiongkok untuk menjadi negara *super power* di Asia Pasifik.

Tampilnya Tiongkok, sebagai negara besar di kawasan dengan modernisasi militernya, sudah tentu juga turut memengaruhi negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kekuatan militernya, terutama negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Dalam beberapa tahun ini, Tiongkok terus memperlihatkan agresivitasnya di Asia Pasifik terutama di wilayah Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan beberapa negara anggota ASEAN dan Laut Cina Timur yang bersinggungan dengan Jepang. Tiongkok, dengan anggaran belanja militernya yang terus meningkat, terus membangun kekuatan pertahanan dan militer yang lebih moderen dan diproyeksikan untuk dapat menerobos lebih dalam ke perairan sengketa.¹⁰⁶

Tiongkok sudah menunjukkan tendensi ekspansionisnya dengan mengambil alih kepulauan Paracel dari Vietnam menggunakan *hard power* dan meluaskan jangkauannya ke seluruh perairan Laut Cina Selatan. Tiongkok dewasa ini dengan kemampuan persenjataannya yang semakin canggih serta program reformasi yang

¹⁰⁶ Simela Victor Muhammad (Peneliti Madya Bidang Masalah-Masalah Hubungan Internasional Pada Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI), "Peningkatan Kekuatan Militer di Kawasan dan Peran ASEAN Regional Forum", P3DI, Vol. VI. No. 6. Hal 7-9. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-7.pdf

ditargetkan untuk membuat Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) lebih profesional. Dapat dimengerti kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara menganggap bahwa modernisasi militer Tiongkok dapat memicu perlombaan senjata di Selat Taiwan, yang dapat menjadi sumber konflik tidak hanya antara Tiongkok dan Taiwan, tetapi melibatkan pihak-pihak lain seperti AS dan Jepang.

Ketegangan di Laut Cina Selatan yang belum surut, akibat tumpang tindih klaim teritorial, telah memaksa Vietnam dan Filipina yang terlibat sengketa dengan Tiongkok juga meningkatkannya kapabilitas pertahanan dan militernya. Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia. Vietnam bahkan dikabarkan tengah memesan peluru kendali dari India. Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyergap baru, dua helikopter anti-kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai, ditambah delapan kendaraan serbu amfibi hingga tahun 2017. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di kawasan, juga terus meningkatkan kapabilitas militernya, di antaranya dengan menargetkan di tahun 2014 ini kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) pada rencana strategis I dapat mencapai 40-42%, yang di dalamnya juga mencakup penambahan alutsista TNI.¹⁰⁷

Di negara-negara di Asia Tenggara mulai aktif untuk memperbarui pesawat dan kapal perang yang telah usang. Meskipun proporsi belanja peralatan pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih cukup kecil. Namun,

¹⁰⁷ *Ibid*

pemerintah masing-masing negara telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan belanja produk tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Enstedt mengatakan bahwa, ada kebutuhan besar dari negara-negara di kawasan tersebut untuk melakukan modernisasi sebagian besar peralatan tempur. Beberapa negara di Asia Tenggara mulai menyadari, bahwa peralatan dan armada pertahanan nasional mereka sudah terlalu usang, sehingga kurang mengakomodasi sistem keamanan internasional.¹⁰⁸

Dalam riset yang dikeluarkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute*, kebutuhan belanja militer di Asia dan Oseania tumbuh 5,4% pada 2015. Jumlah tersebut melampaui total kenaikan belanja militer global yang hanya mencapai 1%. Peningkatan tersebut paling besar disumbang oleh Australia, Selandia Baru dan negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam riset tersebut dikatakan, Indonesia telah meningkatkan belanja pertahanan nasionalnya pada tahun lalu sebesar 16%, Filipina 25% dan Vietnam 7,6%.¹⁰⁹

Richard Birzinger, peneliti modernisasi militer global dari S.Rajaratnam *School of International Studies* di Singapura, mengatakan tren peningkatan belanja alat militer di Asia bukanlah hal yang wajar. Pasalnya, negara-negara ini seolah berlawanan dengan fenomena perlambatan ekonomi global, dengan meningkatkan anggaran belanjanya di sektor tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ "Asia Pasifik Paling Ekspansif", diakses dari <http://koran.bisnis.com/read/20160606/434/554650/asia-pasifik-paling-ekspansif> pada 27 Agustus 2016

Bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara, Tiongkok muncul sebagai salah satu konsumen terbesar alat pertahanan nasional. Meskipun peningkatan anggaran belanja militer tumbuh melambat, Negeri Tembok Raksasa itu tetap menjadikan sektor tersebut sebagai prioritas. Hal ini akibat dari kebijakan Tiongkok yang ingin memperebutkan batas wilayahnya dengan Jepang di Laut Cina Timur. Hal yang sama pun dilakukannya di kawasan Laut Cina Selatan, yang membuatnya bersengketa dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Perubahan kebijakan politik dari satu negara ke negara lain, turut membuka celah bagi beberapa perusahaan produsen militer yang selama ini langkah ekspansinya terbatas. Salah satunya adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang mencabut embargo impor alat militer dari AS ke Vietnam yang telah berjalan selama empat dekade. Akibatnya, pesanan ke beberapa perusahaan seperti Boeing Co. dan Lockheed Martin Corp dari Vietnam pun langsung meningkat. Seperti diketahui, Vietnam telah menganggarkan belanja militernya mencapai 2,3% terhadap PDB pada tahun 2016.¹¹¹

Hal yang sama pun terjadi di Thailand. Kebijakan pemerintah Negeri gajah Putih yang mulai meninggalkan AS sebagai produsen alat militer utamanya, menjadikan lumbung bisnis tersendiri bagi beberapa negara lain seperti Rusia dan Korea Selatan. Baru-baru ini, Thailand telah sepakat untuk membeli 12 helikopter MI-17 dari Rusia, dan empat pesawat latih T-50 TH Korea Selatan. Tercatat, Thailand telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran belanja militernya menjadi 7,6% terhadap PDB pada tahun ini.

¹¹¹ *Ibid*

Doug Greenlaw, wakil presiden di Lockheed, mengatakan dalam sebuah wawancara pada bulan Februari di *Singapore Airshow* bahwa Asia merupakan inti dari strategi perusahaan. Ekonomi di Asia tumbuh lebih cepat daripada negara lain di seluruh dunia. Tak heran mereka cenderung berani meningkatkan belanja alat pertahanan nasional.¹¹²

Keberadaan Korea Utara di kawasan Asia juga menambah satu poin tersendiri sebagai ancaman kemanan yang serius yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan oleh AS, negara-negara kawasan, dan dunia internasional. Korea Utara dengan tegas memperlihatkan keinginannya untuk menggunakan provokasi militer untuk mencapai kepentingan nasional. Pada bulan Agustus 2015, dua buah ranjau darat Korea Utara meledak di wilayah *Demilitarized Zone (DMZ)*, dan melukai dua orang tentara Korea Selatan yang hal ini menciptakan ketegangan yang khusus serius di Senanjung Korea dalam beberapa minggu, dan telah terselesaikan melalui pembicaraan *high-level* antar negara.

Korea Utara masih terus mengejar perkembangan teknologi nuklir dan program rudal balistik *intermediate* dan *long-range* yang mereka kembangkan menjadi ancaman regional dan ancaman bagi kemanan nasional AS yang perlu digaris bawahi. Negara ini terus konsisten meningkatkan kapasitas militernya dan terus mencari cara baru untuk memaksa negara tetangganya untuk memperhatikan perkembangan pertahanan dan militernya.

Perhatian global tentang kegiatan proliferasi Korea Utara terus meningkat, menyebabkan berbagai bangsa untuk mengambil tindakan. Beberapa peristiwa

¹¹² *Ibid*

provokatif dan kontroversial baru-baru ini yang tercatat berdasarkan berdasarkan UNSCRs meliputi¹¹³:

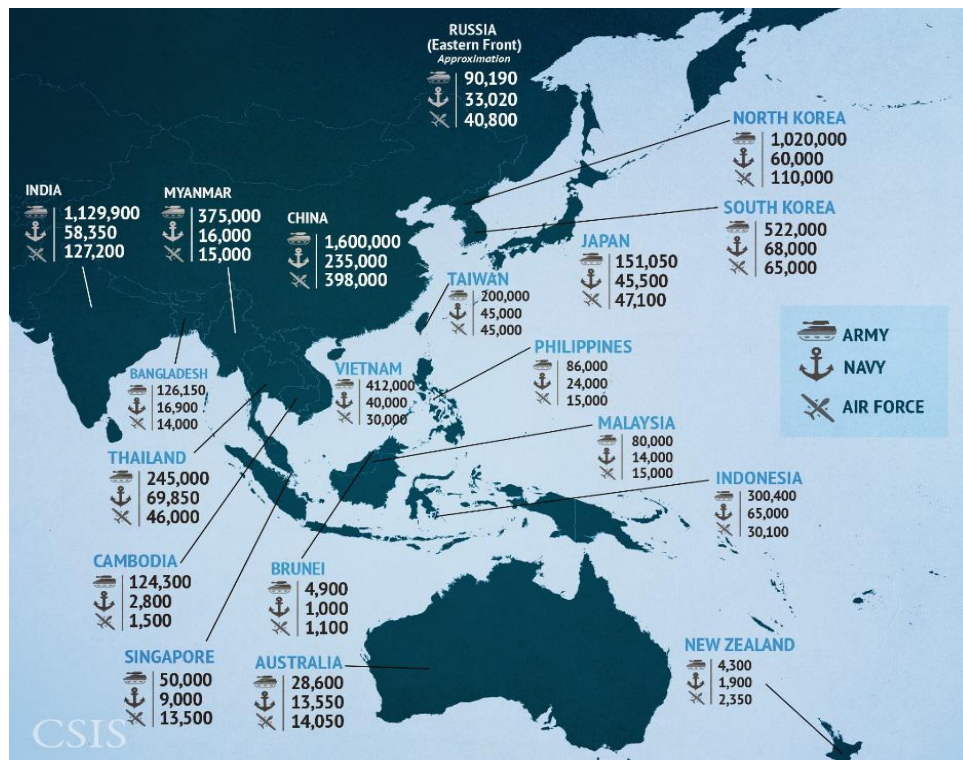
- Pada bulan Oktober 2009, Korea Selatan menyita pakaian pelindung dari senjata kimia Korea Utara yang akan dikirmkan menuju Syria.
- Pada bulan Desember 2009, otoritas Thailand menyita kargo sewaan yang berisi 35 metriks ton senjata Korea Utara, termasuk artileri roket, granat dan *surface-to-air missiles* (SAM).
- Pada bulan Februari 2010, Afrika Utara menyita *spare part* tank Korea Utara yang akan dikirim ke Republik Kongo.
- Pada bulan Juni 2011, Burma mencurigai sebuah kapal yang berbalik arah ke arah Korea Utara setelah menolak untuk diinspeksi angkatan laut AS.
- Pada bulan Juli tahun 2013, pemerintah Panama memberhentikan dan memeriksa kapal berbendera Chon Chon Gang, dan menemukan kargo tersembunyi diantaranya dua pesawat tempur MiG-21 dan mesin terkait, peralatan SA-2 dan SA-3, dan rudal yang spesifikasinya belum diketahui. Cuba mengeluarkan pernyataan mengakui kepemilikan peralatan militer tersebut dan mengklaim itu dikirim ke Korea Utara untuk perbaikan.

Meskipun beberapa dari yang upaya senjata transfer telah dikecam oleh masyarakat internasional, Korea Utara akan terus berusaha melakukan pengiriman senjata melalui rute baru dan semakin kompleks.

¹¹³ “Military and Security Development Involving The Democratic People’s Republic of Korea”, *Report to Congress*, RefID: 3-A 116136, 06 Januari 2016. Hal. 23.

Gambar 3.2

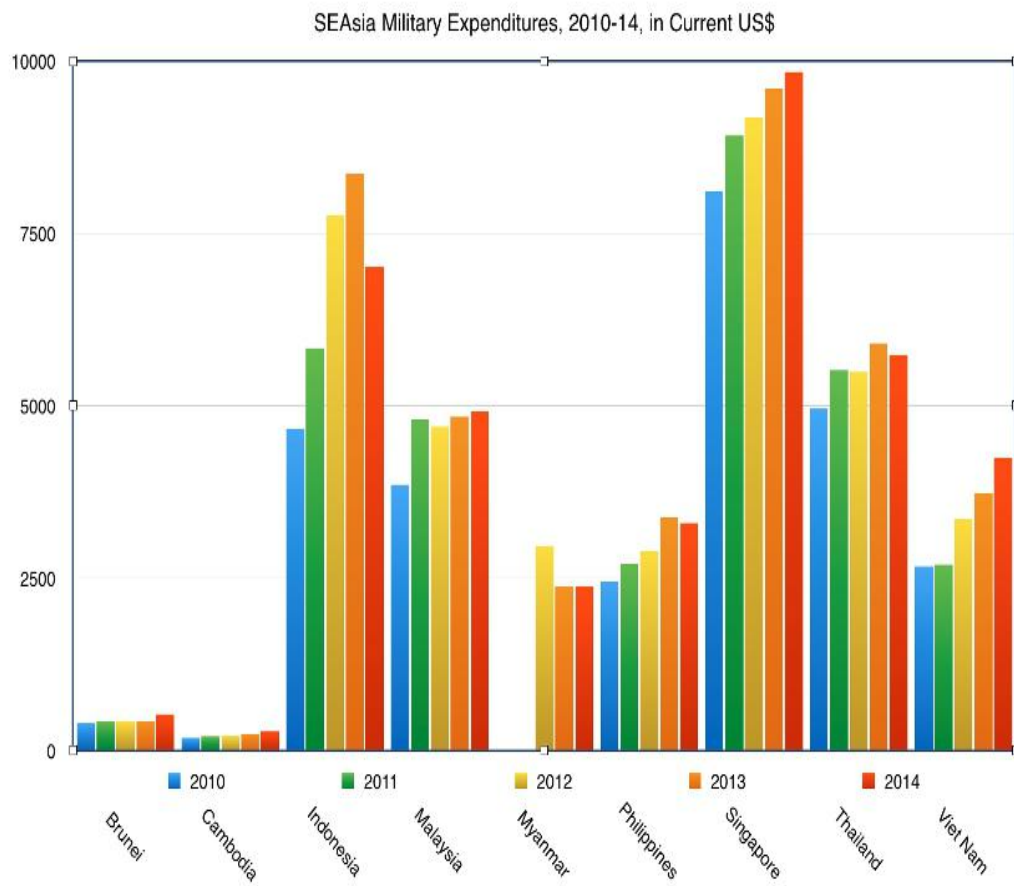
Peta Kekuatam Militer Asia Tenggara dan Kawasan



Sumber: <http://ncid.unav.edu/en/news/philippine-military-buildup-amid-china-tensions>

Grafik 3.1

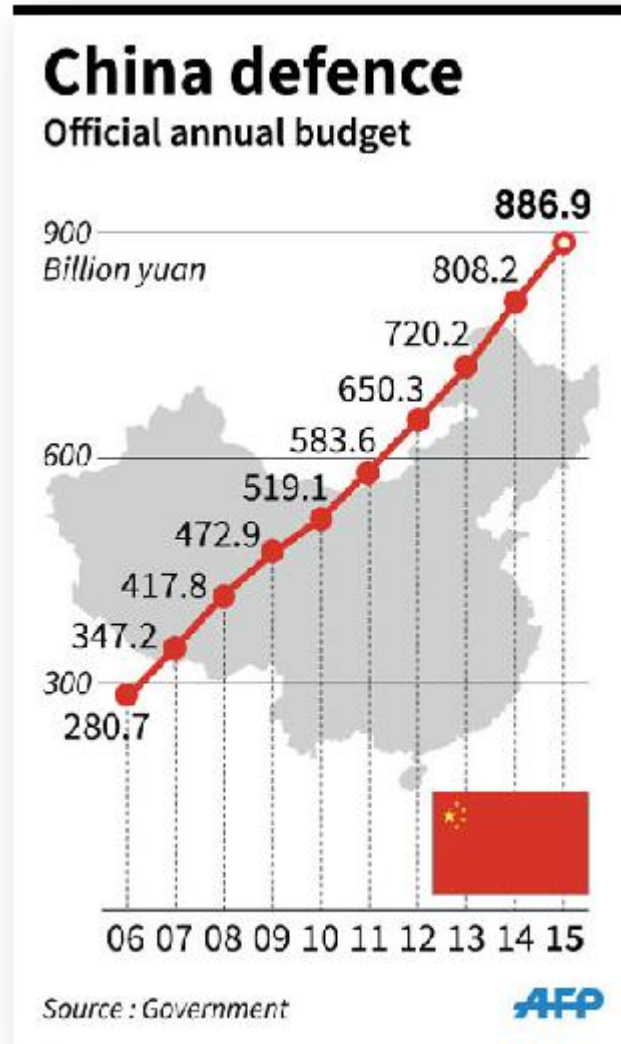
Grafik Pembelanjaan Militer Negara Kawasan Asia Tenggara



Sumber: SIPRI dataset

Grafik 3.2

Peningkatan Anggaran Belanja Militer Cina



Sumber:http://www.chinadailyasia.com/nation/201503/05/content_15234926.html

Tabel 3.2

Balistik Misil Korea Utara¹¹⁴

North Korean Ballistic Missile Forces		
System	# of Launchers	Estimated Range
Toksa	Fewer than 100	75 miles
SCUD-B		185 miles
SCUD-C		310 miles
SCUD-ER		435-625 miles
No Dong	Fewer than 50	800 miles
IRBM	Fewer than 50	2,000+ miles
TD-2	Unknown*	3,400+ miles**
SLBM	At least 1	Unknown
KN08	At least 6	3,400+ miles**

Note: North Korea has produced its own version of the SCUD B, and the SCUD C, an extended-range version of the SCUD B. North Korea will continue using and improving the TD-2, which has only been used in a space-launch role, but could reach the United States with a nuclear payload if developed as an ICBM. North Korea is also developing the KN08 road-mobile ICBM and has paraded six launchers for the system. The KN08, an IRBM, and an SLBM have not been flight-tested and their current reliability as weapon systems would be low.

* Launches of the TD-2 have been observed from both east and west coast launch facilities.

** ICBM is defined as a ballistic missile (land-based) capable of a range in excess of 5,500 kilometers (or 3,418 miles).

¹¹⁴ *Ibid*, Hal. 19.